

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan berjalan dengan baik sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Wati dkk, 2014). Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, jika memberikan data ringkasan anggaran yang sederhana, dan dapat mengatasi masalah yang dibutuhkan klien dalam menentukan pilihan, terbebas dari implikasi yang tidak menguntungkan kesalahan material dan solid pada saat itu laporan keuangan ini dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau masa lalu (Ikyarti dan Aprilia,2019)

Fenomena yang diambil dalam penelitian ini yaitu di dalam catatan atas laporan keuangan Kabupaten Cilacap sekurang-kurangnya disajikan runtutan sebagai berikut : Pertama, informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, Undang-undang Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, Kedua, ikhtisar pencapaian kinerja keuanganselama tahun pelaporan, Ketiga, informasi tentang dasar

penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Tidak hanya itu, fenomena lain seperti Pemerintah Kabupaten Cilacap meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Atas Penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) TA 2018 dan TA 2020. Opini WTP dari BPK RI merupakan pernyataan resmi atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. LKPD yang baik dan akuntabel selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran (BPPKAD, 2019).

Kualitas laporan keuangan yang baik dan akuntabel dipengaruhi oleh variabel pemahaman akuntansi, pemahaman akuntansi memiliki hasil konstruktif yang kritis pada sifat laporan keuangan pemerintah daerah (Diani, 2014). Bukan sekedar pembukuan perjanjian, inovasi pemanfaatan informasi dan dapat membangun sifat laporan keuangan pemerintah daerah. Terkait dengan pengakuan tanggung jawab dan keterusterangan dalam administrasi keuangan daerah, pemanfaatan inovasi informasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengawasan data dengan lebih cepat, cakup, dan berhasil. Posisi teratas dari laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh seberapa hebat kerangka kerja kontrol ke dalam pemerintah terdekat. Pengendalian internal yang lemah menyulitkan untuk menemukan misrepresentation/kesalahan dari siklus pembukuan sehingga realitas *review* yang didapat dari data pembukuan menjadi janggal, (Winidyaningrum & Rahmawati, 2009).

Data pembukuan yang janggal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka diperlukan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yaitu di mana laporan keuangan disampaikan dari interaksi yang bergantung pada informasi, siklus, dan hasil yang baik. Ketiga perspektif ini harus digabungkan dan ekonomis sebagai pembentukan kerangka kerja detail keuangan yang layak (Kurniawan, 2011). Sistem informasi akuntansi merupakan bagian atau susunan perkumpulan yang berkewajiban menyiapkan informasi keuangan untuk membantu para eksekutif dalam keadaan dinamis. Setiap administrasi dalam suatu asosiasi membutuhkan informasi unik seperti yang ditunjukkan oleh tugas dan spesialisnya. Semakin menonjol tingkat pengelolaan, semakin tinggi ketepatan informasi keuangan yang diperlukan (Eveline, 2016).

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga merupakan sistem yang memproses aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam laporan keuangan yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Yuliani dkk, 2010). Untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menunjang kebutuhan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan (BPKP, 2014 dalam Tawaqal dan Suparno, 2017). Menurut Zulfah dkk (2017) laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya dapat dihasilkan dengan kepemilikan sistem informasi akuntansi yang baik oleh pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan apabila seluruh sistem tersebut terintegrasi dengan baik, SIA pun akan semakin baik. Semakin baik SIA, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas (Nugroho dan Setyawati, 2019).

Laporan keuangan yang berkualitas juga didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang maksimal. Peningkatan teknologi informasi telah direaksikan oleh asosiasi dengan merencanakan kerangka data yang bergantung pada situs atau inovasi PC. Framework data yang didukung oleh inovasi data dapat meningkatkan nilai asosiasi jika dimaksudkan untuk menjadi framework yang sukses. Menurut Jogiyanto (2007), data merupakan hasil dari kerangka kerja inovasi data. Inovasi data mengambil bagian penting dalam memberikan data berharga kepada kepala asosiasi, termasuk untuk mengumumkan sehingga lebih berhasil dalam menegakkan siklus dinamis. Aksesibilitas inovasi data diperlukan untuk membantu pengukuran perincian keuangan sehingga dapat membuat laporan keuangan yang dapat diandalkan dan ideal (Rahmawati dkk, 2018).

Kemajuan teknologi informasi semakin pesat mendorong setiap pemerintah daerah untuk ikut serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi menggunakan jaringan internet maupun jaringan intranet untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan dan untuk menyeragamkan laporan keuangan antar SKPD (Roshanti dkk, 2014; Wardani dan Andriyani, 2017). Perkembangan teknologi informasi direpson oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi computer atau website. Sistem informasi yang didukung teknologi informasi dapat memberi nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Menurut Jogiyanto (2017), informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung

proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Laporan keuangan yang handal dan tepat waktu dipengaruhi oleh komponen lain, yaitu Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dijalankan semua melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal badan publik terdiri dari beberapa komponen, khususnya PP No. 60 tahun 2008, antara lain : Pertama, pengendalian iklim, Kedua, penilaian bahaya, Ketiga, latihan pengendalian, Keempat, data dan korespondensi, Kelima, pengecekan kendali masuk. Mengingat *Unofficial Law* 60 Tahun 2008, bahwa interaksi latihan *review*, pengecekan, penilaian, audit dan pemeriksaan menjalankan tugas dan unsur asosiasi dalam memberikan struktur kepastian yang memadai suatu tindakan telah diselesaikan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilakukan dengan sukses dan efektif dalam administrasi dengan mengakui yang hebat disebut *Inner Control* atau disebut juga Pengendalian Internal.

Menurut Jogiyanto (2007), dengan pengendalian internal, dipercaya bahwa semakin tinggi sifat data yang dibuat pada saat itu secara pasti akan mempengaruhi profitabilitas otoritatif. Sifat laporan keuangan secara tegas dipengaruhi oleh kerangka control internal yang diklaim oleh pemerintah regional. Eksplorasi tentang sifat laporan keuangan pemerintah daerah dengan tegas diidentifikasi dengan hipotesis kesiapan pilihan dari data pembukuan (Kiswara, 2011).

Penelitian ini mengembangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saidah Napisah (2018) yang meneliti mengenai Pengaruh Pemahaman AKuntansi terhadap

Kualitas Laporan Keuangan. Pengembangan yang dilakukan adalah menambahkan variabel Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saidah Napisah (2018) yaitu terletak pada variabel yang digunakan. Penentuan variabel variabel ini digunakan untuk dengan alasan untuk meningkatkan proses awal akuntansi sampai dengan laporan keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
- b. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
- c. Apakah teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
- d. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

C. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah, dan tidak jauh dari inti masalah sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Data penelitian ini diambil dalam satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Cilacap.

2. Sampel penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Cilacap dari tahun 2021.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris berpengaruh positif sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris berpengaruh positif teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk membuktikan secara empiris berpengaruh positif pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis sebagai proses pembelajaran dan meningkatkan wawasan juga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada satuan kerja perangkat daerah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi satuan kerja perangkat daerah.

b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

Penelitian ini dapat menjadikan informasi yang bermanfaat dalam penilaian laporan keuangan agar BPK dapat menilai laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dengan tepat.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

